

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Strategi DPRKPP dalam Meningkatkan Jumlah Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rumah Tinggal di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menggunakan teori manajemen strategis menurut (David & David, 2016), maka dapat disimpulkan berdasarkan tiga dimensi utama sebagai berikut:

##### **1. Perumusan Strategi**

Tahap perumusan strategi menunjukkan DPRKPP telah mempunyai visi dan misi yang jelas dan juga telah menetapkan tujuan jangka panjang yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) DPRKPP tahun 2021-2026 terkait target peningkatan persentase bangunan ber-PBG. Hal tersebut, ditunjang dengan petugas pelayanan berkompeten dalam membantu masyarakat, serta adanya petugas pengawas dan pendata di setiap kelurahan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap izin PBG, serta banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalannya biaya retribusi PBG rumah tinggal ditambah dengan terbatasnya jumlah SDM sehingga pelayanan dan pengawasan yang dijalankan menjadi kurang optimal. DPRKPP juga telah menyiapkan strategi alternatif dari strategi utama bagi masyarakat yang melanggar, berupa pemberian surat teguran dan penindakan keras dengan melakukan penyegelan pada bangunan rumah tinggal yang tidak memiliki izin PBG.

## 2. Implementasi Strategi

DPRKPP telah menjalankan strategi yang komprehensif dan inovatif melalui strategi kebijakan dan inovasi program yang mencakup pemberian motivasi pada pegawai dan pengalokasian SDM. Namun, strategi tersebut kurang berjalan secara optimal di Kecamatan Kenjeran, sebab kesenjangan jumlah bangunan yang telah mempunyai PBG (9,2%) dan belum ber-PBG masih terbilang cukup besar (90,50%).

## 3. Evaluasi Strategi

Pada tahap ini, DPRKPP telah melaksanakan evaluasi rutin dari segi internal dengan perwakilan setiap Kecamatan, namun tidak adanya evaluasi berjenjang yang aktif hingga ke tingkat Kelurahan membuat strategi yang diimplementasikan kurang berjalan secara adaptif dan tentunya kurang optimal. Dari data laporan kinerja DPRKPP tahun 2024 juga mengonfirmasi bahwasanya realisasi terhadap indikator peningkatan persentase bangunan ber-PBG belum mampu mencapai target, sehingga dibutuhkan penyesuaian strategi dan upaya berkelanjutan yang lebih intensif.

Berdasarkan penjelasan kesimpulan dari tiga poin di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi DPRKPP dalam meningkatkan jumlah perizinan PBG rumah tinggal di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah memiliki fondasi yang jelas melalui visi, misi dan penetapan tujuan jangka panjang, serta didukung juga dengan Perwali yang mengatur hal tersebut. Namun, dalam proses implementasi strateginya belum dapat berjalan secara optimal sebab DPRKPP masih dihadapkan dengan berbagai tantangan

signifikan dari segi internal dan eksternal. Kemudian, DPRKPP juga kurang aktif melakukan evaluasi berjenjang hingga ke tingkat Kelurahan membuat strategi yang diimplementasikan kurang berjalan secara adaptif dan tentunya kurang optimal. Hal tersebut ditandai dengan kesenjangan yang besar antara jumlah bangunan yang mempunyai PBG dan belum ber-PBG.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran dan rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan jumlah pegawai yang bertugas sebagai pelayanan pemrosesan PBG di DPRKPP dan pengawasan persil bangunan di tingkat Kelurahan, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu pemrosesan dan pengawasan terhadap bangunan yang berpotensi melanggar menjadi lebih optimal.
2. DPRKPP perlu mengambil langkah inisiatif untuk menyelenggarakan rapat *monitoring* dan evaluasi dengan pihak Kelurahan, serta turut melibatkan pihak Kecamatan secara rutin seperti setiap dua bulan atau triwulanan dengan tujuan untuk lebih menggali kendala unik yang dihadapi oleh setiap kelurahan, baik dari sisi masyarakat maupun dari segi operasional, sehingga upaya penyesuaian terhadap strategi yang berjalan menjadi lebih optimal.
3. DPRKPP juga perlu melaksanakan peninjauan ulang terhadap komponen dan struktur perhitungan retribusi PBG, sebab terdapat banyak keluhan dari masyarakat bahwa untuk mengurus izin PBG membutuhkan biaya yang besar, meskipun saat ini DPRKPP telah memiliki program PBG gratis dan

pemberian keringanan retribusi PBG berupa diskon sebesar 50 persen untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun bagaimana dengan kelompok masyarakat yang tidak tercatat sebagai MBR dan termasuk segmen menengah ke bawah, juga harus merasakan beban biaya tersebut.